

PEMBAHARUAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBENTUK MANUSIA INDONESIA BARU

YANG SIAP BERKIPRAH DENGAN BERJAYA PADA ABAD 21

Oleh Suwarsih Madya
FBS Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Untuk dapat menjawab tantangan jaman global bangsa-bangsa harus bekerja keras, tetapi bangsa Indonesia harus bekerja lebih keras karena rendahnya kualitas SDM yang ada. Sistem pendidikan yang ada tampaknya belum memberikan andil yang signifikan dalam membentuk manusia Indonesia yang berkepribadian kuat dan cerdas (intelektual, emosional, spiritual, fisik) sehingga mampu menjawab tantangan jaman tidak hanya untuk kejayaan bagi diri sendiri tetapi juga bagi masyarakat dan bangsa. Oleh sebab itu, pembaharuan pendidikan tampaknya telah merupakan kebutuhan mendesak. Penulis mengajukan duabelas usulan pembaharuan, yang pada intinya berkenaan dengan penentuan politik pendidikan dan kebudayaan dan pembaharuan sistem manajemen pendidikan dengan segala aspeknya untuk memberdayakan seluruh insan pendidikan dan memfungsikan lembaga pendidikan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya membangun pendidikan. Usulan ini diikuti uraian tentang kondisi prasyaratnya.

(Kata-kata kunci: pembaharuan, kecerdasan--intelektual, emosional, spiritual--, konflik kepentingan, kurikulum inti-lokal, mutu/kualitas)

EDUCATIONAL REFORM TO DEVELOP THE NEW INDONESIAN PEOPLE WHO ARE READY TO PERFORM FAVOURABLY IN THE 21 ST CENTURY

Abstract

To be able to answer challenges posed by the global era, all nations in the world have to work hard, but the Indonesian nation has to work harder due to the low quality of the existing human resources. The existing system of education seems

to have failed in contributing significantly to the development of Indonesian people with all intelligence optimally developed intellectually, emotionally, spiritually, bodily-kinesthetically so that they are able to answer the challenges not only for their own individual benefit but also for the favour of the local, national, international community. Educational reform, therefore, seems to be imperative. The writer suggests a twelve-aspect reform programme, of which the core aspects are concerned with the educational and cultural politics and reform in educational management with all its related aspects in order to empower all educational workforce and functionalize educational institutions as well as encourage the communities' participation in the development of education. Following this proposal is a description of the prerequisite condition for change.

Key Words: reform, intelligence—intellectual, emotional, spiritual--, conflict of interest, core-local curriculum, quality

I. Pendahuluan

Tekad untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dengan indikator keterbukaan pikiran dan hati dan transparansi manajemen serta pemberian kesempatan kepada masyarakat dan penggunaan kesempatan tersebut oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan telah dinyatakan berkali-kali dalam berbagai kesempatan oleh Pemerintah hasil Pemilu 1999. Pernyataan tekad tersebut telah diikuti oleh berbagai langkah, yang sebagian disambut baik dan diharapkan segera dilaksanakan, misalnya otonomi daerah, dan sebagian lain dianggap mengecewakan, terutama oleh kelompok masyarakat yang terkena dampak negatifnya, yaitu pembubaran Depsos dan Deppen. Semua ini merupakan hal yang wajar karena setiap perubahan dapat dipastikan mendapatkan reaksi pro

dan kontra tergantung pada sudut dan daya pandang masyarakat terkait. Mereka yang melihatnya dari sudut pandang yang luas dengan daya pandang yang lebih jauh ke depan jangkauannya tentu saja akan memberikan reaksi yang berbeda dibandingkan dengan mereka yang melihatnya dari sudut pandang yang lebih sempit dengan daya pandang sebatas kemampuan kelima indra untuk menangkap hasil upaya yang dilakukan bersama dampaknya. Yang jelas bagi kita semua adalah bahwa masih banyak masalah yang harus diselesaikan di negara kita ini, baik yang berkenaan dengan penegakan supremasi hukum, pemulihan kondisi ekonomi, politik maupun moralitas.

Langkah apapun yang ditempuh dan sistem apapun yang diterapkan dalam upaya perbaikan, kualitas sumber daya manusia merupakan faktor kunci keberhasilannya karena seperti pepatah mengatakan bukannya *“the gun”* tetapi *“the man behind the gun”* yang menentukan. Artinya, perbaikan yang berkelanjutan hanya dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam arti yang sebenarnya, yaitu manusia Indonesia yang semua potensi kecerdasannya (intelektual, seni, emosional, spiritual, fisik) berkembang secara optimal. Kenyataan menunjukkan bahwa sampai saat ini sistem pendidikan yang ada belum berhasil memberikan andil yang signifikan dalam membentuk manusia yang demikian. Oleh sebab itu, tampaknya pembaharuan pendidikan telah merupakan kebutuhan mendesak, bahkan mungkin keharusan. Pertanyaannya adalah “Pembaharuan pendidikan apa yang perlu dilakukan untuk menghasilkan manusia Indonesia yang potensi kecerdasannya berkembang optimal sehingga mampu menjadi warga negara yang tidak hanya berguna bagi dirinya sendiri tetapi juga berguna bagi masyarakat lokal, nasional, dan internasional?” Tulisan ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Dengan keyakinan bahwa pembaharuan pendidikan perlu dilakukan dalam konteks yang ada, pembicaraan akan dimulai dengan gambaran umum keadaan global di abad mendatang, dilanjutkan dengan keadaan nasional yang dicita-citakan, ciri-ciri manusia yang dapat mendukung tercapainya cita-cita tersebut, keadaan Indonesia sekarang dalam hubungannya dengan masa lalu, dan terakhir usulan pembaharuan.

II. Gambaran Umum Keadaan Global dan Nasional di Abad Mendatang

A. Keadaan Global Abad ke-21

Kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam ilmu dan teknologi telah membantu manusia dalam mempertahankan dan atau meningkatkan taraf dan kualitas hidupnya. Berbagai kemudahan telah diperoleh umat manusia berkat kemajuan Ipteks. Namun di lain pihak, pemanfaatan kemajuan Ipteks tanpa tanggung jawab moral dapat pula menyeret umat manusia ke lembah kehancuran, misalnya untuk industri tanpa kepedulian terhadap kesehatan lingkungan dan untuk perang.

Dengan makin banyaknya kemungkinan untuk meraih keuntungan dari berbagai kemajuan Ipteks, dan juga makin meningkatnya kekhawatiran akan terancamnya eksistensi manusia, baik secara kelompok maupun perorangan, makin banyak pula konflik kepentingan yang muncul, yang pada gilirannya akan menimbulkan ketegangan-ketegangan karena tarik ulur dari dua sisi yang berbeda. Berikut ini ketegangan-ketegangan yang diperkirakan akan menjadi masalah utama yang perlu dipecahkan oleh warga dunia global di abad mendatang, seperti diuraikan dalam laporan UNESCO (Delors, 1997):

1. Ketegangan antara kepentingan global dan kepentingan lokal: secara bertahap setiap insan perlu menjadi warga global tanpa kehilangan akarnya, tetapi perlu tetap aktif berperan dalam kehidupan bangsa dan masyarakat lokalnya.
2. Ketegangan antara orientasi nilai universal dan nilai perorangan: secara pelan tetapi pasti, dalam batas tertentu, budaya menjadi terglobalisasi. Globalisasi menawarkan sederet keuntungan sekaligus mengandung resiko, termasuk resiko terabaikannya karakter unik setiap insan manusia, yang pada hakekatnya bebas memilih masa depannya sendiri dan mencapai seluruh potensinya dalam kekayaan tradisi dan lingkup budayanya sendiri yang, bila tidak dijaga, dapat terancam oleh perkembangan kontemporer.
3. Ketegangan antara tradisi dan modernitas, yang merupakan bagian dari masalah yang sama: bagaimana mungkin menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa mem-belakangi masa lalu,

bagaimana otonomi dapat diperoleh dengan tetap mendukung perkembangan bebas orang lain, dan bagaimana kemajuan ilmu dapat diasimilasikan? Tantangan-tantangan ini perlu dijawab dengan bantuan teknologi informasi yang baru.

4. Ketegangan antara pertimbangan jangka panjang dan jangka pendek: ketegangan ini telah lama terjadi, dan justru sekarang diperparah oleh keserbasesaatan dan keserbacepatan. Opini publik menuntut jawaban cepat dan solusi seketika, sedangkan banyak masalah memerlukan strategi yang cermat, terpadu dan ternegosiasikan untuk mencapai pembaharuan. Berkenaan dengan persoalan inilah kebijakan pendidikan mesti dibuat.
5. Ketegangan antara kebutuhan berkompetisi pada satu sisi dan kepedulian terhadap pemerataan kesempatan pada sisi lain: persoalan ini telah dihadapi sejak awal abad ini oleh pembuat kebijakan sosial dan ekonomi dan pembuat kebijakan pendidikan. Berbagai solusi telah sering diusulkan tetapi tidak pernah tuntas. Tekanan untuk berkompetisi diduga telah menyebabkan mereka yang berkuasa kehilangan visi tentang misi mereka, yaitu misi untuk memberikan kepada setiap orang alat/sarana untuk dapat meraih keuntungan penuh dari setiap kesempatan yang ada. Untuk mengatasi masalah ini tiga kekuatan hendaknya dipadukan: kompetisi, yang memberikan insentif; kerja sama, yang memberikan kekuatan; dan solidaritas, yang mempersatukan.
6. Ketegangan antara perluasan luar biasa ilmu pengetahuan dan kapasitas manusia untuk mengasimilaskannya: kurikulum telah sarat muatan, tetapi ada godaan untuk menambah jumlah bidang studi, seperti pengetahuan diri (self knowledge), cara-cara menjamin kesehatan fisik dan psikologis atau cara-cara meningkatkan pemahaman terhadap lingkungan alam dan menjaga kelestariannya. Maka strategi pembaharuan harus mencakup penentuan pilihan, dengan tetap mengingat pentingnya melestarikan ciri-ciri pendidikan dasar yang membelajarkan murid untuk meningkatkan kehidupannya melalui ilmu pengetahuan, eksperimen dan pengembangan budaya mereka.

7. Ketegangan antara kebutuhan spiritual dan material: 'moral' sampai saat ini tampaknya masih merupakan hal yang dirindukan bangsa dunia. Maka merupakan tugas mulia pendidikan untuk mendorong setiap orang, untuk bertindak sesuai dengan tradisi dan keyakinannya dan menghormati kemajemukan, dan mengangkat pikiran dan semangatnya ke tataran universal serta dalam hal tertentu mentransendensikan dirinya. Dapat dikatakan bahwa kelangsungan hidup umat manusia tergantung pada keberhasilan mencapai hal ini.

Bagaimana halnya di Indonesia? Menurut pengamatan penulis, ketegangan-ketegangan di atas terasa telah ada di negara ini. Bahkan telah terasa adanya ketegangan lain, seperti antara kepentingan daerah dan nasional, antara kepentingan partai dan kepentingan bangsa, dan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Bagi bangsa yang sangat majemuk dalam berbagai aspek seperti Indonesia, ketegangan yang timbul karena keragaman kepentingan merupakan hal yang wajar, dan warganya mesti terlatih untuk menyelesaikannya. Akan tetapi pengalaman berbangsa dan bernegara masa Orde Baru, yang menekankan keseragaman, tidak melatih bangsa Indonesia untuk mengatasi konflik kepentingan. Oleh sebab itu, pemberian latihan mengatasi konflik kepentingan hendaknya menjadi salah satu muatan proses pendidikan dari awal, seperti yang disarankan oleh Cuevas dan Gardiner (1997: 89) yang menyatakan bahwa penyelesaian konflik dibangun berdasarkan teori perkembangan kognitif Piaget dan Vygotsky. Menurut Piaget (1969), seperti disitir Cuevas dan Gardiner, latihan menyelesaikan konflik dapat meningkatkan keterampilan memecahkan masalah; sedangkan menurut Vygotsky pengalaman memecahkan masalah akan membantu perluasan bahasa dan proses pemikiran anak-anak terkait (Vygotsky, 1962).

B. Keadaan Nasional Masa Depan dan Keterkaitannya dengan Masa Lalu

1. Masa Depan yang Diinginkan

Mengamati aspirasi masyarakat yang diungkapkan dalam berbagai kesempatan sebagai respons terhadap kepongahan kekuasaan, ketidakadilan, dan berbagai kekerasan/penindasan serta kejadian-kejadian lain yang merugikan

masyarakat, bangsa dan negara, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia baru yang dicita-citakan adalah masyarakat yang beranggotakan orang-orang yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sebagai makhluk individu, dan sebagai makhluk sosial (anggota masyarakat setempat, daerah, nasional, internasional). Orang-orang yang demikian adalah mereka yang berimtaq (memiliki kecerdasan spiritual), beripteks (memiliki kecerdasan intelektual dan seni), berkepribadian Indonesia yang kuat (memiliki kecerdasan emosional Indonesia), sadar hukum, demokratis, mencintai dan mempraktekkan keadilan, kebenaran, dan kedamaian, dan sehat jasmani.

Apa yang dimaksud dengan kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan emosional? Kecerdasan spiritual seseorang adalah kemampuan dan kemauan diri untuk selalu berpedoman pada ajaran-ajaran agamanya saat membuat keputusan dan mengatasi masalah kehidupan, yang mencakup kemampuan dan kemauan membedakan yang benar dan yang salah dalam upaya mengelola kehidupannya, kemampuan dan kemauan menghormati agama dan kepercayaan orang lain, dan kemampuan dan kemauan untuk bergaul dengan pengikut agama dan kepercayaan lain dengan prinsip saling menghargai dan saling menghormati. Kecerdasan intelektual dan seni mencakup kemampuan menyerap dan menyimpan informasi yang bermanfaat dalam otaknya, kemampuan memahami konsep-konsep abstrak dan dalil/adas, dan kemampuan dan kemauan menerapkan secara kritis-kreatif konsep-konsep dan dalil/adas untuk pemecahan masalah kehidupan nyata (lihat Gagne, 1977 dan Romiszowski, 1981), serta memiliki rasa keindahan yang tinggi. Kecerdasan emosional (*emotional intelligence*) mencakup kesadaran-diri dan pengendalian gejala hati (*self-awareness and impulse control*), ketekunan (*persistence*), semangat (*zeal*), emosi-diri (*self-emotion*), empati, dan keterampilan sosial (*social deftness*) (Goleman, 1995, lewat Duhon-Sells, Sells, dan Mouton, 1997).

Sebagai makhluk individu, seseorang hendaknya mengenal dirinya sendiri, sebagai bekal dalam mengenali orang lain dalam masyarakatnya. Pengenalan-diri mencakup unsur-unsur berikut (Stone dan Dillehunt, 1978 lewat Debbie-Sarkovich, 1997): kesadaran-diri (*self-awareness*), pembuatan keputusan pribadi, pengendalian

perasaan, empati, komunikasi, diskursus-diri, wawasan, penerimaan-diri (*self-acceptance*), tanggung jawab pribadi, keasertifan (*assertiveness*), dinamika kelompok, penyelesaian konflik, yang selama ini belum mendapatkan perhatian yang layak.

Orang yang mencapai perkembangan semua potensi seperti diuraikan di atas akan mampu menjawab tantangan jaman dari tingkat perorangan, lokal, daerah, nasional sampai tingkat internasional. Pengembangan manusia yang demikian memerlukan dukungan politik pendidikan dan kebudayaan, dan kebijakan dan program pendidikan yang tepat dan relevan, yang mampu mendorong partisipasi aktif konstruktif seluruh komponen bangsa. Jika ditangani secara tepat, pendidikan akan dapat memainkan peranan kunci untuk meraih keberhasilan pembentukan manusia yang dicita-citakan.

Untuk dapat memulai mengadakan perubahan ke arah perbaikan, diperlukan kejujuran dalam mengenali “seperti apa orang Indonesia sekarang ini”.

2. Masyarakat Indonesia Sekarang sebagai Akibat Masa Lalu

Masyarakat Indonesia sekarang ini memiliki sikap-sikap yang sebagian besar terbentuk selama lebih dari seperempat abad, suatu masa yang diwarnai dengan kepongahan kekuasaan, *lip-service* dan praktek KKN. Dalam masa tersebut, ketika kekuasaan pusat terlalu besar dan terlalu kuat, bahkan sebenarnya bertumpu pada Presiden, hampir seluruh masyarakat Indonesia sangat terbiasa dengan sikap “nyadong” (Jawa =minta/menunggu): “nyadhong dhawuh” (menunggu perintah), “nyadhong rejeki” (minta dana/proyek), “nyadhong pitutur” (minta nasehat), “nyadhong pitedah” (minta petunjuk) dan segala bentuk “nyadhong” yang lain. Pemerintah atau pemegang kekuasaan tampaknya senang terhadap sikap bawahan/rakyat yang demikian. Nilai tinggi diberikan kepada mereka yang paling taat dalam melaksanakan perintah dan julak/juknis, meskipun hasil pelaksanaan tugasnya belum tentu efektif karena juklak/juknis yang dibuat seragam belum tentu cocok untuk kondisi daerah yang sangat majemuk; sehingga untuk dapat efektif dilaksanakan di daerah, kebijakan Pusat perlu diterjemahkan secara kritis-kreatif. Akan tetapi, orang yang kritis-kreatif,

sering berbeda pendapat, justru akan tersingkir atau disingkirkan. Kondisi ini ikut melemahkan penegakan supremasi hukum dan pada gilirannya ikut menyuburkan praktek KKN di semua sektor pada hampir semua tingkat.

Para wakil rakyat (legislatif) pada masa Orde Baru, yang mestinya melaksanakan fungsi kontrol, menyuarakan aspirasi dan jeritan derita rakyat, dan membuat berbagai undang-undang yang akan melindungi kepentingan rakyat, juga kebanyakan duduk diam dan manis seolah terhipnotis dengan permainan indah barisan eksekutif, nyaris tanpa hasil kerja nyata yang efektif sesuai dengan fungsinya. Kemahiran khusus para wakil rakyat terlihat pada saat mengalunkan lagu “Setuju” pada setiap usulan Pemerintah. Pada mulanya sentralisasi memang berfungsi secara efektif sebagai alat untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi, yang memang diperlukan saat itu, namun ternyata ketika stabilitas telah dicapai, bukannya sentralisasi kekuasaan dikendorkan, tetapi makin diperkuat; sentralisasi kekuasaan bukan lagi berfungsi sebagai alat, tetapi telah menjadi tujuan. Akibatnya, pemerintah makin kuat mencengkeram kekuasaannya dan rakyat makin tidak berdaya, bahkan dapat dikatakan tampak makin “bodoh” saja. Untuk ulasan tentang kekuasaan yang pongah, lihat Eep Saifulah (1998).

Kepincangan-kepincangan juga ditemukan dalam bidang pendidikan sebagai sub-sistem, jika penilaian dilakukan tidak hanya berdasarkan laporan, yang hampir tidak pernah menyinggung kekurangan/kelemahan, tetapi juga berdasarkan pengamatan cermat terhadap kenyataan di masyarakat. Manajemen sentralistik pendidikan yang, menurut analisis Tilaar (1997), memiliki lebih banyak kelemahan daripada kelebihan dibandingkan dengan manajemen desentralistik, akhirnya juga beralih fungsi menjadi tujuan, bukan lagi sekedar alat, sehingga kelebihan yang diidentifikasi oleh Tilaar bahkan tampak semu (lihat Madya, 1999). Hirarki jabatan insan pendidikan, yang mestinya mencerminkan hirarki tanggung jawab dan kewajiban, terasa lebih sebagai hirarki kekuasaan sehingga insan-insan di tingkat yang lebih rendah bukannya melayani masyarakat melainkan melayani atasan, terlepas dari apa yang mereka selalu ucapkan setiap tanggal 17, yaitu Sapta Prasetya KORPRI. Kebanyakan personil pendidikan, termasuk guru, bertindak sebagai pelaksana perintah dan petunjuk dari atas, nyaris

tanpa kreativitas. Karena dikondisikan harus melaksanakan juklak dan juknis yang begitu rinci sehingga tidak memberi peluang untuk kreativitas, para guru pada gilirannya juga minta ditaati oleh murid-muridnya, mungkin secara tidak sadar. Ironisnya, para pejabat pendidikan tak henti-hentinya meminta para guru untuk mendidik murid-muridnya berpikir kritis dan kreatif, suatu aspek kehidupan yang bagi mereka sendiri ditabukan untuk mengalaminya. Wajar saja jika program-program yang diarahkan untuk membuat siswa lebih aktif dan kritis serta kreatif belum membawa hasil yang diinginkan, meskipun telah menghabiskan dana milyaran rupiah. Semua ini menyiratkan perlunya pembaharuan manajemen pendidikan untuk memberdayakan seluruh insan pendidikan dan masyarakat dalam proses pembangunan pendidikan.

Dalam tataran politik pendidikan dan kebudayaan, apa yang terjadi di lapangan menyiratkan bahwa pengembangan aspek akademik/intelektualitas lebih mendapatkan tekanan, meskipun masih terbatas pada tataran hafalan, belum sampai tataran pemahaman, apalagi tataran berpikir kritis dengan penalaran yang baik. Yang lebih memprihatinkan adalah kenyataan bahwa anak-anak SD telah kehilangan kesempatan mengembangkan diri secara wajar karena proses pembelajarannya terlalu akademik seperti disinyalir banyak kalangan, misalnya oleh Suyanto (1999). Praktek lapangan bahkan menunjukkan bahwa NEM hasil EBANAS telah didewakan, sehingga aspek-aspek penting dalam pengembangan potensi anak diabaikan. Hal ini telah banyak disuarakan pengamat pendidikan seperti Djohar (1999). Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan NEM sampai mengorbankan aspek-aspek penting kependidikan yang lain. Bahwa pendidikan ditujukan untuk menghasilkan manusia Indonesia seutuhnya dengan segala cirinya yang ideal hanyalah merupakan retorika politik belaka, nyaris tidak pernah diupayakan untuk diterapkan dalam program-program nyata (di tingkat sekolah dan kelas). Bahkan pada periode 1993-1998 lingkup aspek yang mendapat tekanan lebih sempit lagi, yaitu menyiapkan lulusan yang siap pakai. Dengan kata lain, aspek-aspek afektif (nilai-nilai sosial-seni-budaya dan kepribadian/watak) dan aspek keterampilan/kesehatan jasmani serta aspek keterampilan interaktif/komunikasi nyaris tidak tergarap. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dunia pendidikan telah kehilangan jiwa

kependidikannya, dan yang masih ada adalah jiwa pengajaran, itupun masih pada tingkat pencapaian yang sangat rendah dan tataran pembelajaran yang rendah pula, serta lingkup garapan yang sempit pula.

Proses pendidikan yang demikian itu tampaknya telah menghasilkan manusia yang kurang mampu berpikir jernih, cenderung memandang masalah secara "simplistik" sehingga tidak mampu mengenali inti masalah yang sebenarnya dengan akibat ketidakmampuan memecahkannya, sangat kurang cerdas secara emosional sehingga kurang mampu mengendalikan emosi, mudah dihasut dan tanpa beban moral "mampu" merusak fasilitas-fasilitas publik, yang sebenarnya milik mereka juga, dan kurang cerdas secara spiritual sehingga kurang mampu menggunakan ajaran agamanya untuk menuntun hidupnya. Amuk massa yang terjadi pada bulan Mei 1998 dan kejadian sejenis di beberapa tempat pada waktu-waktu yang lain telah membuat kita semua terkesima dan bertanya-tanya, "Apa yang terjadi dengan bangsa ini? Inikah hasil pembangunan selama lebih dari seperempat abad dengan program-program yang didanai uang pinjaman?"

Masalah-masalah pendidikan di atas memerlukan penyelesaian yang komprehensif dengan visi jauh ke depan. Untuk itu penulis akan mengajukan beberapa usulan pembaharuan dan menyajikan gagasan-gagasan tentang kondisi yang mesti diciptakan untuk mendukung terjadinya perubahan.

III. Usulan Pembaharuan dan Kondisi Terjadinya Perubahan

A. Usulan-Usulan Pembaharuan

Untuk mendukung tercapainya pembentukan manusia Indonesia baru yang diinginkan, yang ciri-cirinya disebut pada bagian IIB di muka, akan disampaikan beberapa usulan perubahan yang pernah penulis sajikan dalam seminar pendidikan (Madya, 1999). Pertama, perubahan hendaknya dilakukan dalam politik pendidikan dan kebudayaan. Hendaknya ditegaskan oleh Depdiknas bahwa pembangunan pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia yang berkepribadian Indonesia yang kuat, dengan ciri-ciri yang telah disebut di muka, yang seluruh pengembangan dirinya dapat secara proporsional memenuhi kepentingan pribadi, masyarakat dan

bangsa, dan juga memiliki wawasan global dan mampu bersaing secara global. Dengan demikian, daya saing manusia Indonesia di masa datang akan jauh melampaui tingkat daya saing sekarang yang sangat rendah seperti ditunjukkan oleh laporan *UNDP (United Nations Development Programme)* (1996), juga disitir oleh Suyanto (1999), yaitu pada peringkat 102 dari 174 negara di dunia. "Character building", yang selama ini terabaikan, harus mendapatkan prioritas tinggi. Pilihan ini harus diterjemahkan ke dalam program-program nyata, yang pelaksanaannya dipantau dan dievaluasi dengan indikator keberhasilan yang jelas, idealnya oleh badan yang independen.

Kedua, membumikan proses pendidikan/pengajaran, terutama di tingkat pendidikan dasar, lebih-lebih di SD, untuk memberikan hak-hak anak dalam menjalani kehidupan masa kecilnya sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Melihat tingkat pertumbuhan dan perkembangannya, kegiatan pembelajaran di SD, lebih-lebih pada kelas-kelas rendah (kelas 1-3), hendaknya dilaksanakan secara terpadu alami, diikat dengan issue tematik, bukan terkotak-kotak berdasarkan bidang studi. Selain itu, proses pembelajaran hendaknya dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang sesuai, diikuti dengan dialog interaktif di kelas dan tugas-tugas yang melibatkan pemecahan masalah bersama, dalam bahasa yang dapat mereka tangkap. Sebagai contoh, pelajaran dapat diberikan dalam bentuk ceritera, yang di dalamnya terdapat masalah hitung-menghitung, masalah kehidupan sosial-budaya-agama, masalah IPA dsb. Dalam memahami dan membicarakan masalah-masalah itulah, pengembangan keterampilan bahasa dikembangkan. Dengan kata lain, pengajaran bahasa menerapkan "*the whole language approach*" (Jenson, 1999). Sejak dini anak-anak hendaknya didorong untuk mengekspresikan diri secara kreatif, baik secara lisan maupun tertulis. Singkatnya, kegiatan-kegiatan pembelajaran hendaknya secara intensif melibatkan anak didik, untuk mengembangkan kecerdasan spiritual, intelektual dan emosional, membantu anak mengenal diri sendiri dan lingkungannya, dan membantu anak mengembangkannya. Dengan demikian, aspek kependidikan mendapatkan penekanan yang lebih berat. Pendekatan yang demikian memungkinkan dipadukannya penanaman berbagai nilai kehidupan dalam talian tema. Anak didik hendaknya dibuat "kerasan" di sekolah, dan keberhasilan membuat

mereka demikian merupakan keberhasilan yang perlu dihargai. Pengukuran keberhasilan belajar anak dilakukan lewat pengamatan terpandu yang sah dan handal terhadap perilaku anak dari semua aspek pembelajaran, yaitu aspek kognitif, afektif, psikomotor, keterampilan sosial (Romiszowski, 1981). Keempat pilar pendidikan seumur hidup yang disarankan UNESCO perlu dipertimbangkan penerapannya (Delors, 1997): (1) *Learning to Know*; (2) *Learning to Do*; (3) *Learning to Be*; (4) *Learning to Live Together*.

Ketiga, pengertian ‘mutu’ hendaknya diukur dari segi hakekat pengembangan potensi manusia yang tidak mungkin seragam, karena adanya perbedaan potensi, perbedaan lingkungan dan perbedaan kebutuhan hidupnya. ‘Mutu’ dapat setara tetapi segi penampilan/kinerja dapat berbeda. Sebagai contoh, lulusan SD dan SLTP yang bermutu di daerah nelayan dapat tampil berbeda dengan lulusan SD dan SLTP yang bermutu di daerah industri tetapi memiliki kadar mutu yang setara, misalnya sama-sama percaya diri, sama-sama mempelajari konsep-konsep IPA tetapi dalam konteks lingkungannya masing-masing sehingga konsep yang sama diamati pada gejala alam yang berbeda. Anak yang hidup di daerah nelayan dapat dengan lancar memaparkan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang gejala-gejala alam (misalnya pergerakan angin yang dapat membantu para nelayan merencanakan kegiatannya). Anak yang tinggal di daerah industri dapat memaparkan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang pentingnya mengendalikan polusi di sekitar pabrik dan amatannya terhadap dampak polusi serta langkah-langkah untuk menerapkannya. Dengan pemahaman tentang ‘mutu’ yang demikian, alat pengukuran hasil belajar pun dengan sendirinya berbeda, lebih-lebih untuk bidang-bidang yang sarat muatan nilai-nilai budaya.

Bagaimana kaitannya dengan tuntutan mutu dari dunia nasional dan global? Apakah lulusan SLTP dapat bersaing di dunia global? Jawabnya “Ya”, asal tidak diharapkan bahwa setiap lulusan SLTP harus tampil di panggung nasional dan global dengan cara yang sama; dengan hasil karyanya yang berbeda tetapi sama-sama bermutu mereka tampil menasional dan mengglobal. Misalnya, lulusan SLTP di daerah nelayan dapat ikut menghasilkan ikan-ikan yang bermutu sehingga diminati masyarakat global. Begitu juga teman-teman mereka di daerah kerajinan dapat

menghasilkan kerajinan tangan yang mutu seni garapannya memenuhi standard global. Jadi peran aktif dalam dunia global dapat menjelma dalam wujud yang berbeda.

Keempat, karena keberhasilan PBM akan sangat didukung dengan menyatunya PBM dengan lingkungan, kurikulum hendaknya disesuaikan dengan lingkungan siswa, tidak lagi kurikulum nasional yang menyamaratakan semua kebutuhan belajar. Memang Kurikulum 1994 telah memberikan peluang kepada daerah untuk mengembangkan muatan lokal, tetapi hal ini tampaknya belum memberikan dampak positif yang diinginkan, mungkin karena NEM masih didewakan. Usulan perubahan kurikulum tersebut terkait dengan ketiga usulan di atas. Jadi kurikulum rinci dikembangkan di daerah berdasarkan kurikulum inti dari Pusat; Kurikulum Inti (Pusat) hendaknya berisi hal-hal yang sangat umum seperti tujuan umum, penegasan tentang politik pendidikan dan kebudayaan, prinsip-prinsip dasar untuk mengembangkan silabus, dan cakupan bidang studi wajib dan pilihan, serta prinsip-prinsip penilaian. Singkatnya, jabaran kurikulum di daerah dapat berbeda-beda tetapi wajib diarahkan untuk mencapai tujuan umum yang sama.

Kelima, sebagai konsekuensi dari keempat usulan di atas, evaluasi hasil belajar hendaknya dilaksanakan pada tingkat daerah otonom, bahkan idealnya di tingkat sekolah. Pengukuran diarahkan untuk mengetahui tingkat perkembangan semua jenis kecerdasan (intelektual, seni, emosional, spiritual) dan perkembangan jasmani anak didik, dan pengenalan-diri dengan menggunakan berbagai macam alat ukur yang relevan. Perkembangan keterampilan belajar juga perlu dipantau secara berkala untuk memastikan bahwa makin tinggi tingkat pendidikannya, akan makin terampil pula anak dalam belajar. Semua hasil belajar dibebaskan secara terbuka sebagai umpan balik bagi anak dan orang tuanya.

Untuk tujuan evaluasi hasil belajar, semua unsur yang dinilai perlu disebutkan dalam buku laporan hasil belajar bersama hasil pengukuran kemajuannya, yang dapat disajikan dalam predikat dan atau deskripsi. Usulan ini selaras dengan anjuran UNESCO (Delors, 1997) untuk mencakup semua potensi anak. Dengan dikembangkannya kecerdasan emosional dan pengenalan-diri, ketiga kekuatan (kompetisi, kerja sama, solidaritas)

dengan sendirinya telah terpadu sesuai dengan yang disarankan UNESCO yang disebut pada Bagian IIA di muka. Instrumen untuk pengukuran semua unsur ini hendaknya dikembangkan oleh masing-masing daerah dengan bantuan para ahli melalui program kemitraan antara lembaga pendidikan tenaga kependidikan tenaga kependidikan dan sekolah.

Keenam, untuk bidang-bidang yang bebas budaya, seperti Sains Dasar (IPA, Kimia, Fisik) dan Matematika, dan Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu, dapat dilakukan asesmen nasional, dengan butir-butir soal yang menjaring informasi tentang tingkat pembelajaran yang lebih tinggi dari hafalan. Untuk Bahasa Indonesia, keempat keterampilan makro fungsional perlu diberi perhatian seimbang. Untuk tes bahasa komunikatif dapat diacu Weir (1990). Asesmen nasional ini seyogyanya dilakukan pada kelas 3 dan 5 SD, kelas 2 SLTP dan kelas 2 SLTA sehingga hasilnya dapat dijadikan masukan bagi perbaikan PBM sebelum anak menamatkan belajarnya pada satuan pendidikan tertentu.

Ketujuh, di samping itu semua, semenjak SD, hendaknya guru diwajibkan untuk membantu murid-muridnya dalam mengembangkan kemampuan belajarnya, yang telah diidentifikasi terdiri dari 7 unsur berikut (Goleman, 1995 lewat Duhon-Sells, Sells dan Mouton, 1997): (1) kepercayaan (*confidence*), (2) keingintahuan (*curiosity*), (3) bertujuan (*intentionality*), (4) kendali-diri (*self-control*), (5) *relatedness* (kemampuan berhubungan dengan orang lain berdasarkan rasa saling pengertian), (6) kapasitas untuk berkomunikasi verbal, dan (7) kerja sama. Aspek kemampuan belajar ini tampaknya sampai saat ini belum mendapatkan perhatian yang semestinya. Oleh sebab itu, sejak dini anak-anak perlu dididik untuk mencintai perpustakaan dan dilatih mencari informasi secara mandiri. Akan sangat bagus jika setiap sekolah juga memiliki ruang khusus yang dilengkapi dengan sumber belajar sesuai dengan kemampuan dana yang ada untuk melatih anak mencari informasi secara mandiri, yaitu dalam bentuk *self-access learning centre*. Baca Gardner dan Miller (1999) untuk informasi lengkap.

Kedelapan, untuk membantu lulusan SMU/K yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, seyogyanya dipikirkan tentang

penyelenggaraan program persiapan belajar di perguruan tinggi, yang menekankan pengembangan sikap dan keterampilan belajar akademik, dan untuk kelompok tertentu ditambah dengan substansi akademik seperlunya. Dengan keberhasilan program persiapan tersebut pemborosan yang terjadi akibat drop out dan molornya masa studi akibat mahasiswa kurang memiliki sikap belajar dan keterampilan belajar akademik dan bekal akademik yang memadai dapat diminimalkan.

Kesembilan, untuk menjaga agar sekolah berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya, perlu kiranya dibentuk semacam Dewan Sekolah, yang beranggotakan perwakilan orang tua murid, tokoh-tokoh masyarakat, pejabat Dinas dan Kepala Sekolah. Dewan ini bertugas untuk memberikan masukan kepada manajemen sekolah untuk ikut menjaga agar kualitas dan relevansi PBM dapat terjaga secara berkelanjutan.

Kesepuluh, untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai segi, sekolah hendaknya diberi kebebasan untuk menjalin kerja sama dengan pihak luar, yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas. Hendaknya diupayakan agar partisipasi masyarakat dalam pendidikan tidak terbatas pada aspek pembangunan fisik seperti yang terjadi selama ini. Masyarakat dapat membantu secara finansial dan konseptual dalam mengembangkan perpustakaan dan *self-access learning centre*.

Kesebelas, sekolah hendaknya didorong untuk membudayakan pendekatan R&D dengan program “action research” yang berkelanjutan, tanpa harus tergantung pada adanya proyek. Untuk tujuan ini, hendaknya kerja sama dijalin dengan lembaga-lembaga yang relevan, terutama lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Kerja sama ini akan saling menguntungkan karena pihak sekolah akan dapat meningkatkan keterampilan dalam memecahkan masalah pembelajaran, sedangkan pihak lembaga pendidikan tenaga kependidikan akan makin tajam pemahamannya tentang PBM dalam konteks nyata dan pemahaman ini akan membantu dalam upaya meningkatkan proses pendidikan tenaga kependidikan yang dilaksanakannya.

Keduabelas, tuntutan pelaksanaan penyelenggaraan PBM seperti tersebut di atas memerlukan perubahan pula dalam proses

pendidikan tenaga kependidikan. Pendidikan tenaga kependidikan hendaknya menghasilkan lulusan yang memiliki bekal memadai untuk melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan upaya mencapai tujuan pendidikan, yaitu menghasilkan manusia dengan ciri-ciri tersebut di atas.

Semua perubahan yang diusulkan di atas jelas melibatkan perubahan wawasan, cara berpikir, keyakinan, dan sikap yang harus dicerminkan dalam perilaku nyata. Semua insan pendidikan hendaknya belajar meninggalkan cara berpikir dan sikap yang lama dan yang pertama harus diingat adalah bahwa demokrasi mengharuskan kemandirian, suatu aspek yang nyaris tidak pernah dikembangkan pada masa lalu.

B. Kondisi Prasyarat untuk Keberhasilan Pembaharuan

Suasana demokratis yang mulai terasa sebagai hasil reformasi politik memberikan peluang untuk meraih keberhasilan pelaksanaan usulan-usulan di atas. Namun, secara lebih khusus pelaksanaan usulan-usulan pembaharuan tersebut perlu didukung oleh kondisi prasyarat yang kondusif, yang masih harus diciptakan. Kondisi prasyarat ini memiliki ciri-ciri berikut (diadaptasi dari Everard dan Morris, 1985: 174-176):

1. Tujuan dan kebijakan dirumuskan secara jelas dan lugas. Semua kegiatan selalu diarahkan untuk mencapai tujuan dengan melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh setiap setiap satuan organisasi pendidikan.
2. Struktur ditentukan oleh persyaratan kerja, bukan oleh kewenangan, atau kekuasaan atau kecocokan. Jadi bentuk hendaknya mengikuti fungsi, bukan sebaliknya. Prinsip ini hendaknya diterapkan pada saat dilakukan pengaturan kembali struktur organisasi, misalnya untuk tujuan perampingan dan atau desentralisasi manajemen, dan pada saat membentuk lembaga baru.
3. Proses menunjukkan bahwa (i) keputusan dibuat saat dibutuhkan dan di tempat terjadinya masalah; (ii) komunikasi terbuka; (iii) gagasan-gagasan dipertimbangkan berdasarkan manfaat yang hakiki, bukan menurut sumbernya; (iv) konflik dan perselisihan pendapat (bukan konflik pribadi) didorong, bukan ditekan atau dihindari, dan setiap orang berkesempatan mengatasi konflik secara konstruktif, dengan menggunakan metode pemecahan masalah; (v) kolaborasi dihargai jika menguntungkan

lembaga; (vi) persaingan diminimalkan, kecuali yang memberikan sumbangan terbaik terhadap keberhasilan lembaga.

4. Proses menunjukkan terjadinya hal-hal berikut. Jati diri, integritas dan kebebasan setiap individu dihormati, dan hal ini dijaga lewat pengaturan pekerjaan. Penghargaan intrinsik mendapatkan perhatian. Pekerjaan setiap orang dihargai –baik itu pekerjaan pejabat, guru dan staf administrasi, bahkan pesuruh atau tukang sapu. Salingketergantungan orang ditekan. Setiap orang sadar untuk mengevaluasi pekerjaannya.
5. Penyelesaian masalah dilakukan secara lugas. Ada mekanisme umpan balik dari dalam, sebagian melalui ‘action research’ secara berkelanjutan. Dengan demikian masalah dapat cepat diselesaikan, tidak dibiarkan berlarut-larut.
6. Organisasi/lembaga pendidikan dipandang sebagai sistem terbuka yang bernaung dalam lingkungan yang kompleks dan terus berinteraksi dengan lingkungan tsb. Tuntutan yang berubah-ubah dari lingkungan diikuti terus dan ditanggapi secara tepat.
7. Perubahan untuk perbaikan PBM dan juga manajemen harus menguntungkan individu-individu yang terlibat baik dari segi pengembangan pribadi maupun profesional. Perubahan akan berhasil dilakukan di sekolah asal tidak menambah masalah bagi guru.
8. Ada budaya kesejawatan atau yang disebut Fullan (1982: 108, lewat Everard dan Morris: 176) sebagai “*a common collegiate technical culture*” atau “*analytic orientation*” ke arah pekerjaan orang-orang ybs. Budaya yang demikian dicirikan oleh keterbukaan berkomunikasi, keterampilan komunikasi yang tinggi, keinginan merata untuk bekerja sama, administrasi yang mendukung, kesepakatan yang baik mengenai tujuan pendidikan, pengalaman sebelumnya dalam melakukan perubahan.
9. Pimpinan memiliki kualitas imajinasi dan visi, memiliki apresiasi terhadap tujuan pendidikan yang khusus, baik sosial, spiritual maupun intelektual, mampu mengkomunikasikan tujuan kepada stafnya, dan memahami staf dan murid-muridnya, serta siap berbagi kekuasaan dengan orang-orang kunci dalam lembaganya.

Pelaksanaan usulan-usulan pembaharuan yang mendasar tersebut di atas yang didahului dengan penciptaan kondisi yang kondusif memerlukan “*political will*” semua pihak terkait, terutama dari Pemerintah.

IV. Penutup

Usulan-usulan pembaharuan di atas diajukan sebagai wujud kepedulian penulis terhadap masalah kualitas SDM Indonesia. Peningkatan kualitas SDM sudah tidak dapat diundur-undur lagi karena beratnya tantangan abad mendatang, di mana setiap warga global harus mampu membuat pilihan atau keputusan yang cepat dan tepat, dan mampu bersaing dengan warga lain untuk mengangkat harkat kehidupannya. Jika setiap warga memiliki kualitas yang tinggi, niscaya seluruh bangsa akan berjaya. Kejayaan ini akan berkelanjutan jika setiap warga mampu dan mau belajar seumur hidup. Semua ini dapat dicapai lewat pendidikan yang menjamin berkembangnya semua kecerdasan anak didik sesuai dengan potensinya. Untuk dapat memberikan sumbangan yang bermakna pada keberhasilan upaya meningkatkan kualitas SDM, pembaharuan pendidikan perlu dilakukan secara mendasar. Untuk kepentingan inilah usulan-usulan pembaharuan dikemukakan dalam tulisan ini.

Daftar Acuan:

- Brown, D.J. (1990). *Decentralization and School-Based Management*. London dll: The Palmer
- Cuevas, P.C. & Gardiner, J.S. (1997). Conflict resolution: implementing peace education. Dalam *Exploring Self Science Through Peace Education and Conflict Resolution*. (Ed. Duhon-Sells, R.). Lewiston: The Edwin Mellen Press.
- Delors, J. (1997). *Learning: the Treasure Within*. Paris: UNESCO.
- Djohar (1999). *Menuju Otonomi Pendidikan*. Makalah disajikan pada Seminar Pendidikan Nasional Tahun 1999, ISPI DIY - Primagama, 8-10 November 1999.
- Duhon-Sells, R., Sells, H.C. dan Mouton, A. (1997) Peace education: enhancing caring skills and emotional intelligence in children. Dalam *Exploring Self Science Through Peace Education and Conflict Resolution*. (Ed. Duhon-Sells, R.). Lewiston: The Edwin Mellen Press.
- Everard, K.B. dan Morris, G. (1985). *Effective School Management*. London: Paul Chapman Pub. Co.
- Fatah, E. S. (1998). *Bangsa Saya yang Menyebalkan: Catatan tentang Kekuasaan yang Pongah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Gagne, R.M. (1977). *Conditions of Learning*. New York: McGraw-Hill.
- Gardner, D. & Miller, L. (1999). *Establishing Self-Access*. Cambridge: CUP.
- Jenson, K.M. (1999). *Whole Language and Holistic Language Teaching and Learning*. Makalah disajikan pada Konferensi Internasional IV Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, 11-14 November 1999.
- Madya, S. (1999). *Menuju Otonomi Pendidikan*. Makalah disajikan pada Seminar Pendidikan Nasional Tahun 1999, ISPI DIY - Primagama, 8-10 November 1999.
- Parham, J. dan Satrkovich, D. (1997). *Self Science*. Dalam *Exploring Self Science Through Peace Education and Conflict Resolution*. (Ed. Duhon-Sells, R.). Lewiston: The Edwin Mellen Press.
- Pruet, P. dan Cooley, L. (1997). *Multiple Intelligence*. *Exploring Self Science Through Peace Education and Conflict Resolution*. (Ed. Duhon-Sells, R.). Lewiston: The Edwin Mellen Press.
- Romiszwowski, A.J. (1981). *Designing Instructional Systems: Decision Making in Course Planning and Curriculum Design*. London: Kogan Page.
- Supeno, H. (1999). *Pendidikan dalm Belenggu Kekuasaan*. Magelang: Pustaka Media.
-(1999). *Agenda Reformasi Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Media.
- Suyanto (1999). *Pradigma Baru Sistem Pendidikan Abad 21*. Makalah disajikan pada Seminar Pendidikan Nasional Tahun 1999, ISPI DIY - Primagama, 8-10 November 1999.
- Tilaar, H.A.R. (1992) *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Weir, C.J. (1990). *Communicative Language Testing*. New York dll.: Prentice Hall.

